



DINAS KOMINFO
KAB. BENGKULU UTARA

RENJA
2025



RENCANA KERJA **Organisasi Perangkat**

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

f

Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H Arga Makmur

e

www.diskominfo.bengkuluutarakab.go.id



diskominfo@bengkuluutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara. Diharapkan nantinya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 dibuat, agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi serta dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur,

2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bengkulu Utara



NIRWAN TOMERL, S.H.

NIP. 19710625 200604 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR BAGAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra OPD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Inovasi Perangkat Daerah	38
2.6 Penghargaan.....	39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	40
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49

BAB V PENUTUP.....57

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD	10
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	17
Tabel	2.3	Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD.....	30
Tabel	2.4	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	33
Tabel	2.5	Daftar Penghargaan	39
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program & Kegiatan OPD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	42
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program & Kegiatan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Data Pegawai Berdasarkan Eselon	23
Gambar 2.2	Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	23
Gambar 2.3	Grafik Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.....	25
------------	---	----

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Renja Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan dokumen–dokumen perencanaan harus saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak bertentangan dengan visi misi kepala daerah. Serta harus memperhatikan dokumen perencanaan tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan

baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2022.
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara Nomor 000.7.2.5/3863/BAPPELITBANGDA Tentang Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan sektor Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 1 tahun (2025).

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan sektor Komunikasi Informatika Provinsi Bengkulu;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman kepada RPJMD Provinsi Bengkulu;
3. Menyusun program/kegiatan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, baik yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maupun program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 dan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarann OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2024 (sampai dengan Triwulan ke-2) dan perkiraan capaian Tahun 2024 (Tahun berjalan yaitu Triwulan ke-2) mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, dan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6. Inovasi Daerah

2.7. Penghargaan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3. Program dan Kegiatan memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun

untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1 Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Tahun 2017 merupakan tahun pertama berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Penyusunan program dan kegiatan bertujuan untuk mengarahkan Dinas dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Disisi lain banyak hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan-perbaikan agar Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026 pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan secara umum adalah menjalankan fungsi SKPD dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, penyelenggaraan sarana pendukung e-government, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk selanjutnya pada Bab ini akan dibahas mengenai kajian terhadap Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 (s.d Triwulan ke-2) dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026, telah disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang tertuang pada Renstra SKPD, walaupun masih banyak hal-hal yang memerlukan biaya tambahan untuk mencapai target kinerja yang maksimal. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ada beberapa yang tidak dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas. Keterbatasan dana merupakan salah satu faktor yang paling utama, disisi lain ada program dan kegiatan yang sifatnya prioritas dan harus segera dilaksanakan, sehingga mengesampingkan kegiatan lainnya.

Untuk lebih mengetahui tingkat capaian realisasi target Renja dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 s.d Triwulan ke-2 (Juni 2024) dapat dilihat pada Tabel. 2.1. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s.d triwulan ke-2 tahun 2024 pada halaman berikut ini :

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO PADA TRIWULAN 2 TAHUN 2024

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022 (TAHUN n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023 (TAHUN n-2)			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN/ TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN/ n-1)		
											TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023 (TAHUN n-2)	REALISASI RENJA TAHUN TAHUN 2023 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN/TAHUN n-1)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)*
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	99,52	%	98,57 %	98.57 %	98.57 %	100%	98.57 %			
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
2	16	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan			
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan			

2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14	Orang Bulan	100 %	26/14 Orang dan Bulan	26/14 Orang dan Bulan	100%	26/14 Orang dan Bulan			
2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen			
2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan			
2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan			
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	-	-		0 Paket			
2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	-	-	-		1 Pegawai			
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket			
2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	100 %	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket			
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket			
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	4 Eksemplar	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	40 Kali	41 Laporan	41 Laporan	100%	25 Laporan			

2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	3	Unit	-	-	-		2 Unit			
2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	-	-		1 Unit			
2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	-	-		1 Unit			
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %			
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan			
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan			
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	93	%	90,00 %	90 %	90 %	100%	90 %			
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	90 %	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit			
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	80 %	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit			
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unti	100 %	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit			

2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	100.00	%	25,62 %	34,49 %	34,49 %	100%	51,74 %			
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan	5089	Informasi	1304 Informasi	1,755 Informasi	1,755 Informasi	100%	2633 Informasi			
2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	55	Media	-	-	-		-			
2	16	02	2	1	0007	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3	Permohonan	-	-	-		-			
2	16	02	2	01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	4	Laporan	-	-	-		-			
2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	32	Komunitas	-	-	-		-			
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	85.00		55,00 %	60,00 %	72,50 %	120%	70,00 %			
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Sub Domain	-	15 Sub Domain	15 Sub Domain	100%	-			
2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		Dokumen	-	-	-		-			

2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	90,91	%	33 %	45,45 %	45,45 %	100%	60,61 %			
2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	37	Aplikasi	-	-	-	-	-			
2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	4	Unit	-	-	-	-	-			
2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	33	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-			
2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	4	Dokumen	-	-	-	-	-			
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	55,00		35 %	45,00 %	45,00 %	100%	47,00 %			
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan	92,00	%	60 %	75,00 %	75,00 %	100%	78,00 %			
2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20	Dokumen								

2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	45,00		33,33 %	36,00 %	36,00 %	100%	39,00 %			
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi	45,00	%	33,33 %	36,00 %	36,00 %	100%	39,00 %			
2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19	Laporan	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	7 Laporan			
2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100%	13 Perangkat Daerah			
2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	45,00	%	30,30 %	36,00 %	36,00 %	100%	39,00 %			
2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	Perangkat Daerah	100 Informasi	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100%	13 Perangkat Daerah			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government (e – government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengelolaan data statistik sektoral dan sistem keamanan persandian.

Secara Administrasi pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara mencakup wilayah 19 Kecamatan yakni Kecamatan Arga Makmur, Arma Jaya, Hulu Palik, Kerkap, Tanjung Agung Palik, Air Napal, Air Padang, Air Besi, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, Putri Hijau, Uluk Kupai, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya dan Kecamatan Enggano.

Capaian kinerja yang telah dicapai secara umum adalah menjalankan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, antara lain adalah menjalankan fungsi OPD untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini, pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika terbagi dalam dua bidang yaitu pelayanan Bidang Komunikasi dan pelayanan Bidang Informasi. Dibiidang komunikasi mencakup pelayanan infrastruktur komunikasi yang menunjang sistem pemerintahan dalam bentuk elektronik (*E-Government*) yang cakupannya saat ini hanya sebatas lingkup OPD. Selain itu pelayanan di bidang informasi mencakup penyebaran informasi pembangunan daerah melalui Media Center, Radio Kharisma, dan Publikasi data statistik sektoral daerah. Kedepan, diharapkan pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika bisa seimbang baik ke OPD maupun ke masyarakat.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA 2022 S/D 2025

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
			TAHUN 2022 (n-2)	TAHUN 2023 (n-1)	TAHUN 2024 (n)	TAHUN 2025 (n+1)	TAHUN 2022 (n-2)	TAHUN 2023 (n-1)	TAHUN 2024 (n)	TAHUN 2025 (n+1)	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH			98,57 %	98.57 %	98.57 %	99.05 %	98,57 %	98.57 %	98.57 %	99.05 %	
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	26/14 Orang dan Bulan	26/14 Orang dan Bulan	28/14 Orang dan Bulan	100 %	26/14 Orang dan Bulan	26/14 Orang dan Bulan	28/14 Orang dan Bulan	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil			2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik			2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			70 Stel	0 Paket	0 Paket	70 Paket	-	-	0 Paket	70 Paket	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	2 Pegawai	1 Pegawai	2 Pegawai	-	-	1 Pegawai	2 Pegawai	
Persentase pemenuhan administrasi umum			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100 %	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4 Eksemplar	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Eksemplar	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			40 Kali	41 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	40 Kali	41 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	

Jumlah pengadaan BMD			3 Unit	4 Unit	2 Unit	3 Unit	-	-	2 Unit	3 Unit	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Uunit	1 Unit	2 Unit	-	-	1 Unit	2 Unit	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
Persentase pemenuhan jasa penunjang			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD			90,00 %	90 %	90 %	93 %	90,00 %	90 %	90 %	93 %	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			90 %	5 Unit	5 Unit	5 Unit	90 %	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			80 %	2 Unit	2 Unit	2 Unit	80 %	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN			18,45 %	34,49 %	51,74 %	69,17 %	25,62 %	34,49 %	51,74 %	69,17 %	
Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan			939 Informasi	1,755 Informasi	2633 Informasi	3520 Informasi	1304 Informasi	1,755 Informasi	2633 Informasi	3520 Informasi	
Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			-	-	-	50 Media	-	-	-	50 Media	
Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			-	-	-	2 Permohonan	-	-	-	2 Permohonan	
Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika			-	-	-	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	
Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			-	-	-	30 Komunitas	-	-	-	30 Komunitas	
PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)			52,50 %	60,00 %	70,00 %	77,50 %	55,00 %	72,50 %	70,00 %	77,50 %	
Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabuapten/kota			-	15 Sub Domain	-	-	-	15 Sub Domain	-	-	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	

Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota			33 %	45,45 %	60,61 %	75,76 %	33 %	45,45 %	60,61 %	75,76 %	
Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional			-	-	-	35 Aplikasi	-	-	-	35 Aplikasi	
Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas			-	-	-	2 Unit	-	-	-	2 Unit	
Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			-	-	-	30 Perangkat Daerah	-	-	-	30 Perangkat Daerah	
Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan			-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	
PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH			40 %	45,00 %	47,00 %	50,00 %	35 %	45,00 %	47,00 %	50,00 %	
Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan			67 %	75,00 %	78,00 %	83,00 %	60 %	75,00 %	78,00 %	83,00 %	
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			-	-	-	17 Dokumen	-	-	-	17 Dokumen	
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			33,33 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	33,33 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi			33,33 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	33,33 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			2 Dokumen	3 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	1 Dokumen	3 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			11 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah			33,33 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	30,30 %	36,00 %	39,00 %	42,00 %	
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi			100 Informasi	12 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	100 Informasi	12 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	

2.2.2. Organisasi dan Tata Laksana Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Fungsi

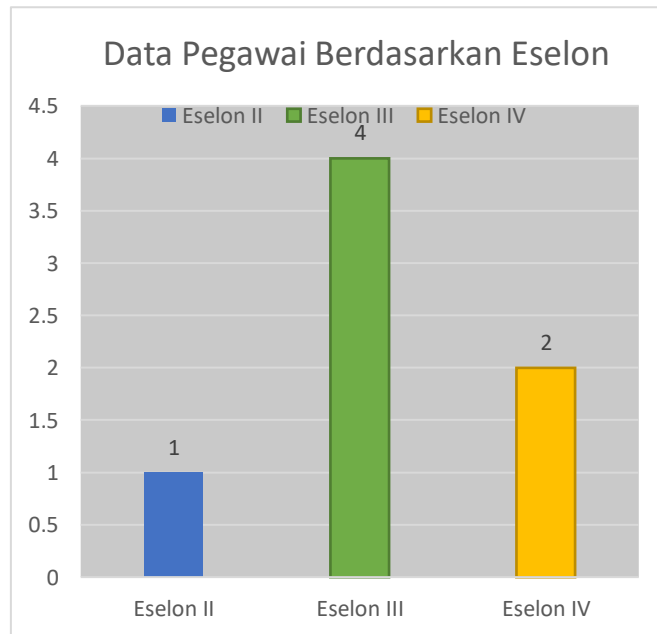
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 didukung oleh 58 (Lima Puluh Delapan) orang pegawai/karyawan yang terdiri 24 (Dua Puluh Empat) orang PNS dan 34 (Tiga Puluh Empat) orang karyawan dengan status Tenaga Harian Lepas (THL).

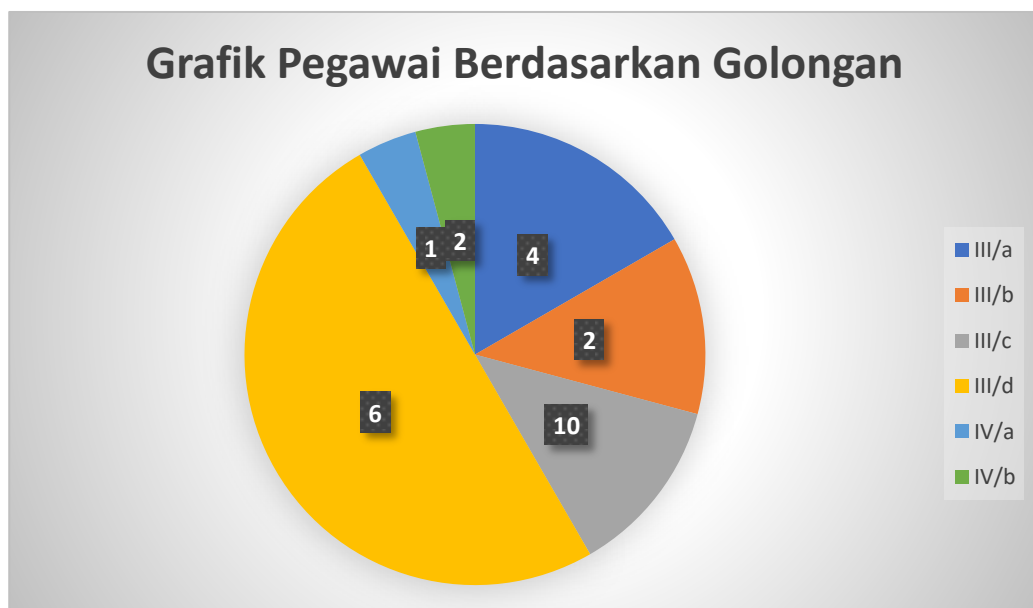
Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.1



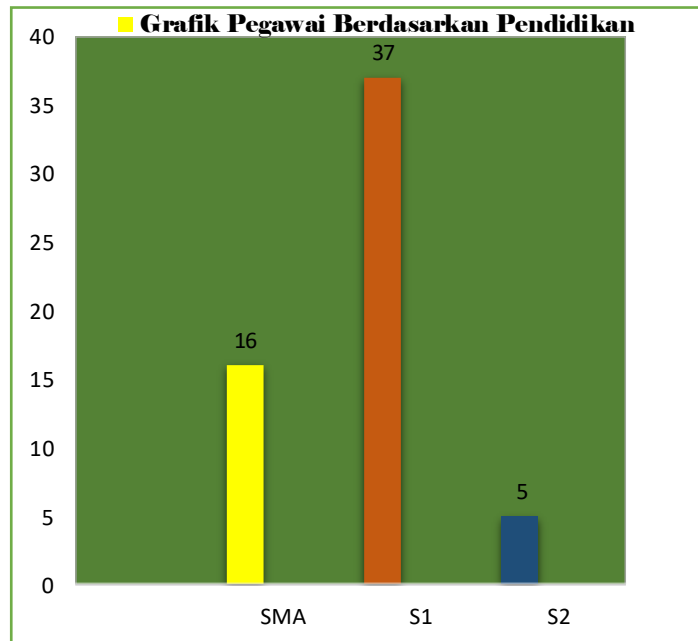
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Gambar 2.2.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Gambar 2.3



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

3. Struktur Organisasi

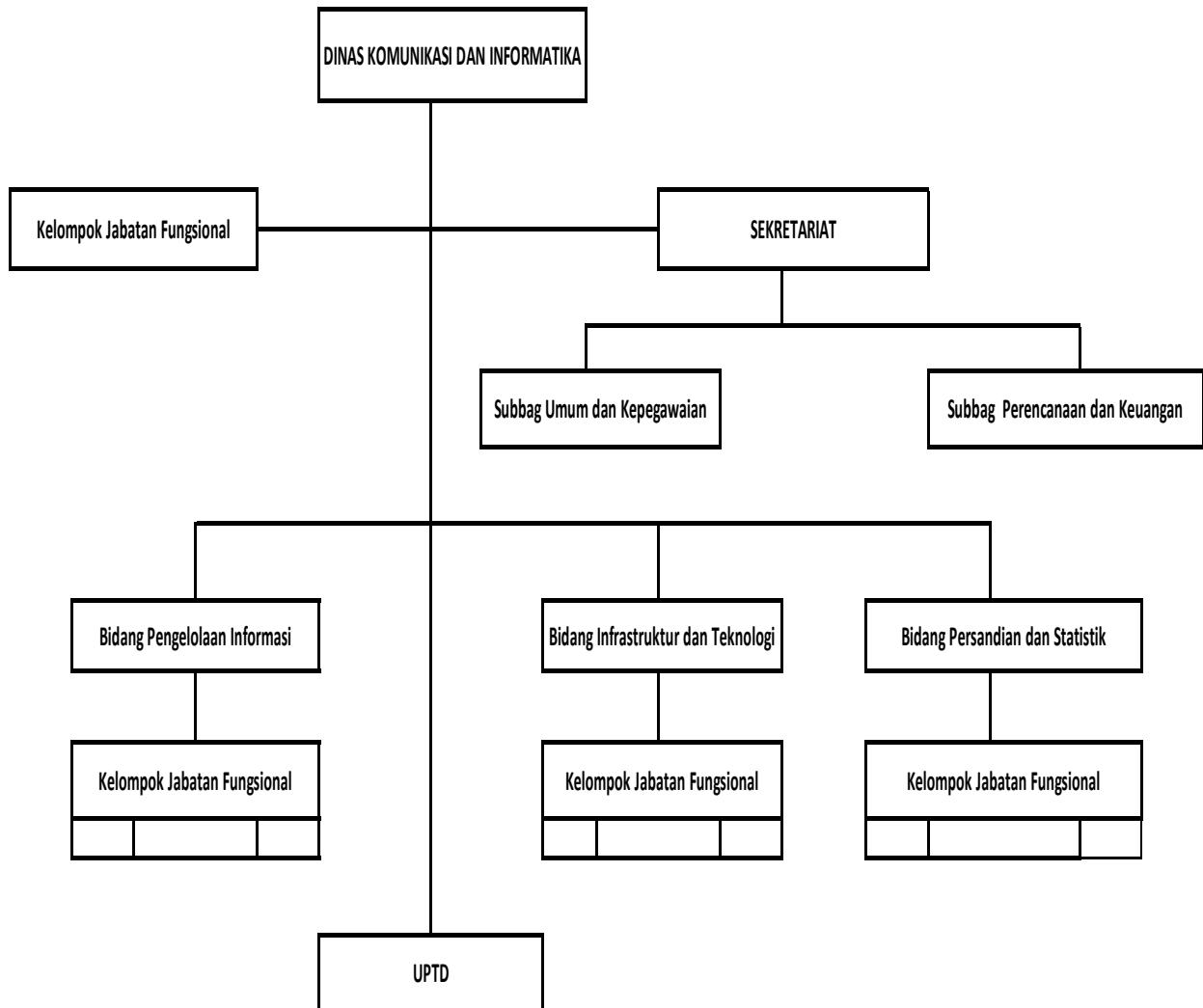
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, pada gambar 2.1 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Pengelolaan Informasi, yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Publik, dan Seksi Pelayananinformasi Publik;
3. Bidang Infrastruktur Dan Teknologi, yang terdiri atas : Seksi Layanan Dasar Infrastruktur, Seksi Layanan Manajemen Data, dan Seksi Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
4. Bidang Persandian dan Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Persandian, Seksi Keamanan Persandian, Dan Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan 2.1 dibawah ini :

Bagan 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



2.2.3. Tugas dan Pelayanan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas Perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Diskominfo :

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika:

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan Perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan asset dan urusan kepegawaian.

Fungsi Sekretariat :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan, Penyelenggaraan Pengawasan, Pembinaan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- d. Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- h. Pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di Lingkup Sekretariat;
- i. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas
- j. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- k. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
- m. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- n. Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama;
- p. Pelaksanaan urusan keuangan;
- q. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- r. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- s. Pelaksanaan urusan pengelolaan gaji;
- t. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- u. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- v. Penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, dan kepustakaan;
- d. Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. Menyenggarakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban kantor;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan urusan keuangan.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas
- b. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Perngkoordinasian dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
- e. Pengkooordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nlaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Pengelolaan data dan kerja sama;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan
- i. Pelaksanaan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
- j. Pelaksanaan urusan perbendaharaan penatausahaan dan tata laksanakan keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- k. Pelaksanaan urusan pengelolaan gaji;
- l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran;
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- n. Penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran. Neraca, dan catatan atas laporan keuangan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehb atasan.

Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan program kerja pengelolaan informasi.

Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi :

- a. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media publik;
- d. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pelayanan informasi publik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi meliputi :

- a. Kelompok Substansi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

- b. Kelompok Substansi Penyediaan Konten Lintas Sektor dan Pengelolaan Media; dan
- c. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Publik.

Bidang Infrastruktur dan Teknologi

Bidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, pembinaan, Perencanaan pengaturan dan pengawasan program-program kerja penyelenggaraan e-Government.

Fungsi Bidang Infrastruktur dan Teknologi :

- a. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan program kerja di Bidang Infrastruktur dan Teknologi
- b. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan program penyediaan Infrastruktur dan Teknologi
- c. pengkoordinasian penyusunan, pengaturan, pengawasan program layanan Infrastruktur dasar;
- d. pengkoordinasian, pengaturan, pengawasan program layanan manajemen data;
- e. pengkoordinasian, penyusunan, pengaturan, pengawasan program layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan jenjang keahlian meliputi :

- a. Kelompok Substansi Layanan Infrastruktur dasar;
- b. Kelompok Substansi Layanan Manajemen Data; dan
- c. Kelompok Substansi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan program pengelolaan persandian, pengamanan persandian dan pengelolaan statistik sektoral;

Fungsi Bidang Persandian dan Statistik :

- a. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan atau peraturan perundang-undang di bidang persandian dan statistik, pengamanan persandian dan pengelolaan statistik sektoral;
- b. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan persandian;
- c. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan pengamanan persandian;
- d. perencanaan, penyusunan, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan statistik sektoral;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional pada Bidang Persandian dan Statistik berdasarkan jenjang keahlian meliputi :

- a. Kelompok Substansi Pengelolaan Persandian;
 - b. Kelompok Substansi Pengamanan Persandian; dan
- Kelompok Substansi Pengelolaan Statistik Sektoral

2.2.4. Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan RPJMD Diskominfo Statistik Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Diskominfo BU	Sasaran Renstra Diskominfo Statistik Provinsi Bengkulu	Sasaran Renstra Kemenkominfo
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik elektronik dan media komunikasi radio	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Indeks e- Government (SPBE)	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola		Persentase Regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
4.	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		Persentase Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika
5.	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan E- Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang terkelola	Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
6.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital

7.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian (Indeks Persandian)	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
8.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
9.	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
10.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 s/d 2026, maka Visi dan Misi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 s/d 2026 harus didukung oleh Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Sebagai bentuk *responsibility* SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terhadap fungsi organisasi, maka rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan beban tugas organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana tercantum dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, isu – isu strategis yang dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan

biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, guna terciptanya E-government (Pemerintahan secara elektronik);

- b. Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang belum maksimal sebagai mitra pemerintah yang menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat sampai tingkat desa;
- c. Desiminasi informasi pembangunan pemerintah daerah yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat sehingga perlu ada inovasi selain kegiatan pameran pembangunan dan media informasi yang belum berbasis TIK;
- d. Masih banyaknya permohonan pengaduan ke Komisi Informasi yang belum terselesaikan di PPID Pembantu dan pelayanan yang belum berbasis TIK; Data statistik yang dilaksanakan kerjasama dengan BPS Kabupaten Bengkulu Utara perlu diadakan evaluasi untuk keakuratan datanya dan Data Statitik yang berbasis website belum terbangun.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP AKHIR RKPD TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				Catatan Penting								
							LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	Pagu Indikatif (Rp)			LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	Pagu Indikatif (Rp)									
1						2	5	7			14	2	5	7			14								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,197,063,824	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,197,063,824			
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5,126,163,824	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5,126,163,824			
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMINFO	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	99.05	%	2,820,063,824	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMINFO	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	99.05	%	2,820,063,824			
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100	%	97,890,000	2	16	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100	%	97,890,000			
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	90,000,000	2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	90,000,000		
2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokumen	2,511,000	2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokumen	2,511,000		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen									Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen				
2	16	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dokumen	2,000,000	2	16	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dokumen	2,000,000		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen									Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen				
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2,100,000	2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2,100,000		
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1,279,000	2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1,279,000		

2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,309,365,000	2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,309,365,000	
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14	Orang Bulan	2,186,365,000	2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14	Orang Bulan	2,186,365,000	
2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	120,000,000	2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Dokumen	120,000,000	
2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	3,000,000	2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	3,000,000	
2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah	100	%	28,000,000	2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah	100	%	28,000,000	
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	28,000,000	2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	28,000,000	
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	45,000,000	2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	45,000,000	
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70	Paket	20,000,000	2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70	Paket	20,000,000	
2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	25,000,000	2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	25,000,000	
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	134,180,000	2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	134,180,000	
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,000,000	2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,000,000	
2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	43,500,000	2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	43,500,000	
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12,000,000	2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12,000,000	
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	7,680,000	2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	7,680,000	
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	70,000,000	2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	70,000,000	

2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah pengadaan BMD	3	Unit	30,000,000	2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah pengadaan BMD	3	Unit	30,000,000
2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000
2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	20,000,000	2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	20,000,000
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100	%	112,428,824	2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100	%	112,428,824
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	59,028,824	2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	59,028,824
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	53,400,000	2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	53,400,000
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	93	%	63,200,000	2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Dinas Kominfo	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	93	%	63,200,000
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	54,000,000	2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	54,000,000
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	1,200,000	2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	1,200,000
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unti	8,000,000	2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unti	8,000,000
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINFO	PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	69.17	%	1,469,000,000	2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINFO	PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	69.17	%	1,469,000,000
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan	3520	Informasi	1,469,000,000	2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan	3520	Informasi	1,469,000,000
2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	50	Media	1,170,900,000	2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	50	Media	1,170,900,000
2	16	02	2	1	0007	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2	Permohonan	23,000,000	2	16	02	2	1	0007	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2	Permohonan	23,000,000
2	16	02	2	01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3	Laporan	35,000,000	2	16	02	2	01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3	Laporan	35,000,000
2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30	Komunitas	240,100,000	2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	30	Komunitas	240,100,000

2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO	PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	77.50		837,100,000	2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO	PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	77.50		837,100,000	
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Sub Domain		2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Sub Domain		
2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		Dokumen		2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		Dokumen		
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	75.76	%	837,100,000	2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	75.76	%	837,100,000	
2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35	Aplikasi	443,000,000	2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35	Aplikasi	443,000,000	
2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2	Unit	304,100,000	2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2	Unit	304,100,000	
2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30	Perangkat Daerah	30,000,000	2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30	Perangkat Daerah	30,000,000	
2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2	Dokumen	60,000,000	2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2	Dokumen	60,000,000	

2	20						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					15,000,000	2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					15,000,000	
2	20	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	KABUPATE N BENGKULU UTARA	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	50,00		15,000,000	2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	KABUPATE N BENGKULU UTARA	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	50,00		15,000,000	
2	20	02	2	01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan	83,00	%	15,000,000	2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan	83,00	%	15,000,000	
2	20	02	2	01	0010		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	17	Dokumen	15,000,000	2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	17	Dokumen	15,000,000	
2	21						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					55,900,000	2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					55,900,000	
2	21	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KABUPATE N BENGKULU UTARA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	42,00		55,900,000	2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KABUPATE N BENGKULU UTARA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	42,00		55,900,000	
2	21	02	2	01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi	42,00	%	22,700,000	2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi	42,00	%	22,700,000	
2	21	02	2	01	0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan	10,000,000	2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan	10,000,000	
2	21	02	2	01	0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	14	Perangkat Daerah	12,700,000	2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	14	Perangkat Daerah	12,700,000	
2	21	02	2	02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	42,00	%	33,200,000	2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	42,00	%	33,200,000	
2	21	02	2	02	0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	14	Perangkat Daerah	33,200,000	2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	14	Perangkat Daerah	33,200,000	

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Inovasi Digital yang berbentuk inovasi pelayanan publik menggunakan digitalisasi LPPL Radio Kharisma Ratu Samban.

Sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan saluran informasi publik. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara menyediakan LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagai sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di semua wilayah. Untuk pelaksanaan inovasi daerah, menggunakan media digital sudah dilakukan oleh LPPL Radio Kharisma Ratu Samban, yaitu menggunakan website, media sosial facebook, dan play store sudah berlangsung sejak tahun 2020. Selain dari itu adanya narasumber-narasumber yang lebih berkompeten dengan program yang bisa diajukan guna menunjang perkembangan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Sumber-sumber yang mendukung pembangunan ini diantaranya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah daerah, instansi lintas sektoral, stakeholder, BUMN, BUMD, dan organisasi atau personal lainnya.

Tujuan utama dari LPPL Radio Kharisma Ratu Samban yaitu untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif negara. LPPL Radio Kharisma Ratu Samban sebagai sarana penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara agar sampai kepada masyarakat melalui media digital yaitu sarana diseminasi informasi yang bersifat digital dengan karakteristik interaktif yang bersifat jaringan dengan menggunakan baik komputer, laptop, gadget perangkat penyiaran dan internet melalui website dan jejaring sosial. Adanya media digital yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas dengan tidak lagi terbatas pada wilayah. Artinya masyarakat saat ini dapat mengakses informasi dari LPPL Radio Kharisma tidak hanya menggunakan Frekuensi saja akan tetapi dapat menggunakan media digitalnya juga. Adanya program pembangunan daerah yang mendapatkan porsi sebagai salah satu program untuk meningkatkan promosi pembangunan, seperti kegiatan promosi UMKM melalui Radio Kharisma Ratu Samban. Menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti pemilik usaha, stakeholder yang berkaitan dengan wirausaha dan sejenisnya. Adapun hasil dari inovasi ini ialah mampu meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.6 Penghargaan

Tabel 2.5

**Daftar Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2017-2023**

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Peringkat Kedua Kategori Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
2.	Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Tahun 2019	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
3.	Anugerah KPID Bengkulu Awards 2020 (Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran Pemkab Bengkulu Utara)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
4.	Anugerah KPID tahun 2022 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
5.	Anugerah KPID tahun 2023 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Regional	Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue Kerja pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa adanya Kebijakan Nasional yang dapat dipedomani untuk menjalankan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, baik kebijakan lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun kebijakan eksternal berupa peluang dan ancaman. Perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul.

Melalui interaksi faktor internal-eksternal, maka perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan kepada terlaksananya pelayanan yang prima oleh aparat yang bersih dan berwibawa menuju provinsi termaju di Indonesia. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi berdasarkan visi dan misi daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi daerah;

2. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Infrastruktur dan teknologi, serta Bidang Persandian dan Statistik.

Dengan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, sasaran target kinerja Renstra SKPD serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
2. Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Tahun 2021-2026 maka secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 yang berisi rencana urusan, program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target program dan kegiatan, lokasi program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif APBD untuk masing-masing program/kegiatan.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2026	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,197,063,824					6,398,457,764
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5,126,163,824					6,233,457,764
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	DINAS KOMINFO	99.05 %	2,820,063,824	APBD		99,52% %		4,343,457,764
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	100 %	97,890,000	APBD		100 %		125,750,000
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	1 Dokumen	90,000,000	APBD		2 Dokumen		70,000,000
2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	2 Dokumen	2,511,000	APBD		2 Dokumen		14,000,000
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen		APBD		2 Dokumen		

2	16	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kominfo	2	Dokumen	2,000,000	APBD		2	Dokumen	7,750,000
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dokumen				2	Dokumen	
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	4	Laporan	2,100,000	APBD		4	Laporan	24,000,000
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	1	Laporan	1,279,000	APBD		1	Laporan	10,000,000
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	100	%	2,309,365,000	APBD		100	%	3,711,264,218
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	28/14	Orang Bulan	2,186,365,000	APBD		28/14	Orang Bulan	3,584,264,218
2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	20	Dokumen	120,000,000	APBD		20	Dokumen	120,000,000
2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	4	Laporan	3,000,000	APBD		4	Laporan	7,000,000

2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	100	%	28,000,000	APBD		100	%	30,000,000
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kominfo	2	Laporan	28,000,000	APBD		2	Laporan	30,000,000
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	100	%	45,000,000	APBD		100	%	35,000,000
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo	70	Paket	20,000,000	APBD		0	Paket	-
2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kominfo	2	Orang	25,000,000	APBD		2	Orang	35,000,000
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Dinas Kominfo	100	%	134,180,000	APBD		100	%	130,400,000
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	1	Paket	1,000,000	APBD		1	Paket	3,300,000
2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	5	Paket	43,500,000	APBD		5	Paket	48,000,000
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kominfo	2	Paket	12,000,000	APBD		2	Paket	7,000,000
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kominfo	4	Dokumen	7,680,000	APBD		4	Dokumen	7,100,000
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	30	Laporan	70,000,000	APBD		30	Laporan	65,000,000

2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Dinas Kominfo	3	Unit	30,000,000	APBD		3	Unit	12,900,000
2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo	2	Unit	10,000,000	APBD		2	Unit	6,900,000
2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Kominfo	1	Unit	20,000,000	APBD		1	Unit	6,000,000
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang	Dinas Kominfo	100	%	112,428,824	APBD		100	%	147,143,546
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo	12	Laporan	59,028,824	APBD		12	Laporan	62,143,546
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	12	Laporan	53,400,000	APBD		12	Laporan	85,000,000
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Dinas Kominfo	93	%	63,200,000	APBD		93	%	151,000,000
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kominfo	5	Unit	54,000,000	APBD		5	Unit	90,000,000
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kominfo	2	Unit	1,200,000	APBD		2	Unit	8,000,000
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo	1	Unti	8,000,000	APBD		1	Unti	53,000,000

2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	DINAS KOMINFO	69.17	%	1,469,000,000	APBD		100.00	%	985,000,000
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pembangunan daerah yang dipublikasikan	Dinas Kominfo	3520	Informasi	1,469,000,000	APBD		5089	Informasi	985,000,000
2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Dinas Kominfo	50	Media	1,170,900,000	APBD		55	Media	645,000,000
2	16	02	2	1	0007	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Dinas Kominfo	2	Permohonan	23,000,000	APBD		3	Permohonan	30,000,000
2	16	02	2	01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfo	3	Laporan	35,000,000	APBD		4	Laporan	30,000,000
2	16	02	2	01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	30	Komunitas	240,100,000	APBD		32	Komunitas	280,000,000
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	DINAS KOMINFO	77.50		837,100,000	APBD		85.00		905,000,000
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bengkulu Utara		Sub Domain		APBD			Sub Domain	200,000,000
2	16	03	2	01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Bengkulu Utara		Dokumen		APBD			Dokumen	200,000,000

2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Dinas Kominfo	75.76	%	837,100,000	APBD		90.91	%	705,000,000
2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kabupaten Bengkulu Utara	35	Aplikasi	443,000,000	APBD		37	Aplikasi	205,000,000
2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kabupaten Bengkulu Utara	2	Unit	304,100,000	APBD		4	Unit	105,000,000
2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kabupaten Bengkulu Utara	30	Perangkat Daerah	30,000,000	APBD		33	Perangkat Daerah	295,000,000
2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Kabupaten Bengkulu Utara	2	Dokumen	60,000,000	APBD		4	Dokumen	100,000,000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					15,000,000	APBD				45,000,000
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	KABUPATEN BENGKULU UTARA	50,00		15,000,000	APBD		55,00		45,000,000
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan	Kabupaten Bengkulu Utara	83,00	%	15,000,000	APBD		92,00	%	45,000,000
2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kabupaten Bengkulu Utara	17	Dokumen	15,000,000	APBD		20	Dokumen	45,000,000

2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					55,900,000	APBD				120,000,000
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KABUPATEN BENGKULU UTARA	42,00		55,900,000	APBD		45,00		120,000,000
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi	Kabupaten Bengkulu Utara	42,00	%	22,700,000	APBD		45,00	%	70,000,000
2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Bengkulu Utara	12	Laporan	10,000,000	APBD		19	Laporan	35,000,000
2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Bengkulu Utara	14	Perangkat Daerah	12,700,000	APBD		15	Perangkat Daerah	35,000,000
2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	42,00	%	33,200,000	APBD		45,00	%	50,000,000
2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kabupaten Bengkulu Utara	14	Perangkat Daerah	33,200,000	APBD		15	Perangkat Daerah	50,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, Kedudukan Tahun Rencana (RKPD) dan Capaian Kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Harus mewakili Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2025

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	PROGRAM/OUTCOME				KEGIATAN, SUB KEGIATAN/ OUTPUT				PAGU INDIKATIF 2025	PRAKIRAAN MAJU 2026	JENIS PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
										KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
1						2	3	4	5	6	7	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16	17
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												5,222,063,824	6,398,457,764		
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												5,151,163,824	6,233,457,764		
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	DINAS KOMINFO	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	%	99.05					2,845,063,824	4,343,457,764	PROGRAM LANJUTAN	DINAS KOMINFO
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	%	100	97,890,000	125,750,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	90,000,000	70,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2,511,000	14,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
														Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2				

2	16	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2,000,000	7,750,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
														Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2				
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2,100,000	24,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1,279,000	10,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	2,309,365,000	3,711,264,218	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	28/14	2,186,365,000	3,584,264,218	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	120,000,000	120,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	3,000,000	7,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpenuhinya administrasi BMD perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah	%	100	28,000,000	30,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	28,000,000	30,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpenuhinya kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	70,000,000	35,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	20,000,000	-	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. (3B1)	Dinas Kominfo				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	50,000,000	35,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpenuhinya administrasi umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	100	134,180,000	130,400,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,000,000	3,300,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	43,500,000	48,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12,000,000	7,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	7,680,000	7,100,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	70,000,000	65,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpenuhinya pengadaan BMD	Jumlah pengadaan BMD	Unit	3	30,000,000	12,900,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	6,900,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	6,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpenuhinya jasa penunjang	Persentase pemenuhan jasa penunjang	%	100	112,428,824	147,143,546	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	59,028,824	62,143,546	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	53,400,000	85,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terpeliharanya BMD	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	%	93	63,200,000	151,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	54,000,000	90,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	1,200,000	8,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Kominfo				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unti	1	8,000,000	53,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	16	02					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	DINAS KOMINFO	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	PERSENTASE INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN	%	69.17					1,469,000,000	985,000,000	PROGRAM LANJUTAN	DINAS KOMINFO
2	16	02	2	01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	Jumlah Informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	Informasi	3520	1,469,000,000	985,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	0021		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	50	1,170,900,000	645,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	1	0007		Pelayanan Informasi Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	23,000,000	30,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	0016		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	3	35,000,000	30,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	02	2	01	0015		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo					Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	30	240,100,000	280,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	DINAS KOMINFO	MENINGKATNYA CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	PERSENTASE CAPAIAN NILAI E-GOVERNMENT (SPBE)	%	77.50					837,100,000	905,000,000	PROGRAM LANJUTAN	DINAS KOMINFO
2	16	03	2	01			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terkelola nya Sub Domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Sub Domain			200,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	01	0004		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Dokumen Pemerintah Desa	Dokumen			200,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Kominfo				Terawasinya Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan OPD dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Persentase Aplikasi Elektronik /Teknologi Informasi Yang Dipergunakan dan Jumlah OPD yang diawasi dalam penerapan e-government pemerintah daerah Kabupaten / Kota	%	75.76	837,100,000	705,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	35	443,000,000	205,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Pembangunan Infrastruktur, Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	2	304,100,000	105,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	30	30,000,000	295,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	16	03	2	02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	2	60,000,000	100,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											15,000,000	45,000,000		
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN BENGKULU UTARA	TERSEDIAANYA DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	%	50,00				15,000,000	45,000,000	PROGRAM LANJUTAN	DINAS KOMINFO
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan	Persentase Data Statistik Sektoral untuk perencanaan	%	83,00	15,000,000	45,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara				Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	17	15,000,000	45,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										55,900,000	120,000,000				
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BIROKRASI REFORMASI PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN BENGKULU UTARA	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	42,00					55,900,000	120,000,000	PROGRAM LANJUTAN	DINAS KOMINFO
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi	%	42,00	22,700,000	70,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	21	02	2	01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	7	10,000,000	35,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	21	02	2	01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	13	12,700,000	35,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi daerah	%	42,00	33,200,000	50,000,000	Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo
2	21	02	2	02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Birokrasi Reformasi Pemerintahan	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Bengkulu Utara					Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	14	33,200,000	50,000,000	Sub Kegiatan Lanjutan	Dinas Kominfo

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 dalam tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi, Teknologi Informatika dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara ditentukan oleh dukungan yang maksimal dari seluruh karyawan dan karyawan serta kerjasama lintas sektoral (SKPD) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara maka sasaran pembangunan di Bidang Komunikasi, Teknologi Informatika yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2025 tercatat secara jelas, sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan yang akan datang dapat diukur dan dinilai keberhasilannya

Penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 ini menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Bidang/Sub Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diharapkan dapat mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal tersebut diperlukan peningkatan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur,

2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



NIRWAN TOMERL, S.H.

NTP 19710625 200604 1 002